BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Internet mulai masuk di Indonesia sekitar tahun 1994 (Wikipedia) dan berkembang hingga saat ini. Asosiasi penyelenggara jasa Internet menyatakan jumlah pengguna internet di Indonesia naik setiap tahunnya hingga sekarang bisa menembus angka 64,8% dari total seluruh penduduk Indonesia, atau sekitar 171,17 juta jiwa penduduk Indonesia. APJI tidak bisa memungkiri bahwa bukan tidak mungkin jumlah pengguna internet di Indonesia akan terus meningkat seiring berjalannya waktu (Katadata). Internet yang semakin berkembang ternyata menimbulkan manfaat dalam memudahkan hubungan interaksi antar sesama penggunanya, bukan hanya sesama pengguna di dalam negeri saja, bahkan orang yang ada diluar negeri pun sangat mudah untuk dijangkau dalam berinteraksi sehingga hal tersebut berhasil memunculkan inovasi untuk mengalihkan kegiatan yang ada di dunia nyata ke dunia maya, salah satunya adalah kegiatan ekonomi.

Era *modern* seperti saat ini telah memunculkan banyak hal baru dan membuat banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat sekarang, hal ini tidak lepas dari dampak pesatnya perkembangan teknologi (Arisandy, 2017). Perkembangan teknologi era sekarang membuat seseorang mempunyai fleksibilitas yang tinggi dalam melakukan aktivitas sehari-hari, sebagai contoh dulunya kegiatan transaksi jual beli hanya menggunakan sistem konvensional kini mulai bergeser menggunakan sistem elektronik. Masyarakat dengan mudah bisa menerima sistem elektronik dan mulai berangsur meninggalkan sistem

konvensional dalam menjalankan roda bisnis mereka dengan menggantinya menjadi sistem perdagangan model baru seperti sekarang, jelas masih banyak sekali kekurangan dari sistem perdagangan elektronik, namun harus kita akui bahwa perdagangan menggunakan sistem elektronik lebih banyak manfaat dan kemudahan yang diperoleh pengguna dibanding menggunakan sistem konvensional, salah satunya adalah dimana penjual dan pembeli dalam bertransaksi tidak diwajibkan untuk bertatap muka satu sama lain selain itu kemudahan lainnya yang didapatkan dari penggunaan sistem elektronik bagi penjual yang menggunakannya adalah mudahnya sarana dalam melakukan promosi dengan memanfaatkan luasnya jangkauan sistem elektronik (Cahyadi dan Oka Margana, 2018) Promosi tentu akan sangat mudah dilakukan oleh penjual dan biaya yang dikeluarkan pun bisa dibilang tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan melakukan kegiatan promosi di media masa seperti pada sistem konvensional. Jangkauan yang luas ini membuat target pasar seorang pelaku bisnis dengan sistem elektronik mempunyai peluang menjangkau konsumen yang lebih luas dibanding pelaku bisnis konvensional yang ruang lingkup jangkauannya hanya terpaku pada lingkungan sekitar tempat pelaku usaha tersebut menjalankan usahanya. Pelaku bisnis dengan sistem elektronik bukan hanya bisa menjual produknya keluar daerah dan bahkan ke luar negeri, cukup dengan membuat / memajang *display* produk yang dijual melalui media sosial ataupun *platform e-commerce* yang ada. Calon pembeli kemudian hanya perlu melihat lihat *display* yang sudah dipajang dan apabila tertarik bisa melakukan pembelian sesuai dengan sistem yang digunakan penjual tanpa harus bertemu secara langsung. Kemudahan lainnya yang didapat pedagang yang menggunakan sistem elektronik ini adalah mereka tidak perlu mengurus izin usaha, menyewa

gedung dsb, sehingga biaya yang dikeluarkan juga tidak sebanyak pedagang yang masih menggunakan sistem konvensional (Cahyadi dan Oka Margana, 2018) adanya beberapa nilai plus dari sistem elektronik membuat perdagangan dengan sistem ini bisa dikatakan lebih mempunyai banyak manfaat serta kemudahan dibanding menggunakan sistem konvensional.

Melihat sistematis kerja yang ada bisa dikatakan bahwa pelaku bisnis dengan sistem elektronik akan sangat mudah dapat menghasilkan omzet atau penghasilan yang lumayan tinggi dengan biaya operasional yang sedikit, bahkan penghasilan yang diperoleh mereka bisa melebihi pelaku perdagangan yang masih menggunakan sistem konvensional karena perdagangan dengan sistem elektronik memiliki jumlah pasar yang tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu (Ferial, 2018). Tahun 2018 menurut artikel yang diterbitkan (cnbcindonesia) jumlah perputaran uang transaksi perdagangan *online* atau yang menggunakan sistem elektronik menembus angka Rp 77,766 triliun. Angka ini meningkat secara signifikan bahkan persentasenya menyentuh hingga 151% dari tahun sebelumnya. Tahun 2019 baru-baru ini, menurut sebuah artikel yang diterbitkan (Katadata) di perkirakan jumlah transaksi perdagangan yang menggunakan sistem elektronik akan menembus angka Rp 120 T. Jumlah perputaran uang yang sangat besar ini yang kemudian dapat dicium oleh pemerintah dan berencana akan membuat sebuah peraturan perpajakan mengenai perdagangan melalui sistem elektronik ini. Jumlah perputaran uang yang fantastis serta semakin menjamurnya pelaku perdagangan dengan sistem elektronik inilah yang sudah sepantasnya dijarang secara maksimal oleh pemerintah dalam pemenuhan kewajiban pajak untuk menambah pendapatan negara dalam menunjang kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional, terlebih hingga saat ini peraturan perpajakan yang

mengikat para pedagang *online* hanya pajak penghasilan final saja belum mencapai atau belum menjangkau jenis pengenaan pajak lain seperti pajak pertambahan nilai.

Sudah bukan rahasia umum jika pajak disebut sebagai salah satu sumber penerimaan utama negara. Dijelaskan tentang pajak lebih mendalam menurut (Wokas dan Kobandaha, 2016) dalam pajak ada mekanisme tentang sistem pemungutan pajak yang harus sedikit kita ketahui sistem pemungutan pajak adalah suatu sistem dalam suatu pemungutan terhadap pajak dan dapat digambarkan dengan adanya suatu metode untuk mengelola utang pajak yang di bayarkan terhadap pihak-pihak yang terkait untuk masuk ke kas Negara. Pendapatan dari pajak ini yang akan digunakan pemerintah untuk membangun negara ini menjadi lebih baik dan diharapkan dapat menimbulkan manfaat untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur (Tiraada, 2013) dengan melihat jumlah transaksi dan uang yang beredar di bisnis *online* yang lumayan besar ini tentunya bisa menjadi jalan terang bagi pemerintah yang sedang mempunyai ambisi guna meningkatkan penerimaan negara diluar sektor non-migas. (Viana, Elisabeth, Margareth dan Serly, 2018) dalam jurnalnya menilai bahwa pemerintah kurang sigap dan terkesan lambat dalam mengimbangi pesatnya pertumbuhan pada sektor perdagangan yang menggunakan sistem elektronik. Pemerintah hingga saat ini masih berusaha untuk menarik pajak atas semua transaksi perdagangan yang menggunakan sistem elektronik tersebut. (Cahyadi dan Oka Margana, 2018) dalam jurnalnya mengungkapkan bahwa belum banyak pelaku bisnis yang menggunakan sistem elektronik mempunyai inisiatif untuk melaporkan pajak usahanya, biarpun bisa dikatakan pertumbuhan pelaku bisnis pada sistem elektronik dalam beberapa tahun terakhir meningkat, sehingga di lain paragraf

(Cahyadi dan Oka Margana, 2018) juga berpendapat bahwa pertumbuhan pelaku bisnis dengan sistem elektronik masih tidak sebanding dengan hasil pungutan pajak yang diperoleh pemerintah, karena masih rendahnya tingkat kepatuhan dari wajib pajak yang bergerak dalam perdagangan dengan menggunakan sistem elektronik ini. Hal inilah yang kemudian dianggap pemerintah sebagai celah dalam sektor perpajakan di Indonesia yang harus diperbaiki sistemnya guna meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan Indonesia dari sektor pajak. Latar belakang yang digunakan pemerintah dalam menimbang, dimana perlu adanya aturan khusus tentang pemungutan pajak pada perdagangan dengan sistem elektronik adalah bahwa dengan adanya sistem perdagangan secara elektronik sekarang, perlu untuk lebih dipermudah bagi pelaku usahanya dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam hal ini pelaku PMSE sehingga para pelaku usaha dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakan dengan mudah sesuai dengan sistem yang digunakan pedagang tersebut baik secara elektronik maupun konvensional (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018). Ruang lingkup pengaturan dari PMK 210/2018 adalah tentang perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) dalam Peraturan Menteri ini meliputi Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan atas transaksi di dalam Daerah Pabean dan Bea Masuk dan/atau PDRI atas Impor barang. Direktur jenderal pajak dalam surat edaran nomor SE/62/PJ/2013 tentang penegasan ketentuan perpajakan atas transaksi perdagangan dengan sistem elektronik / *online* menegaskan tidak ada perbedaan perlakuan perpajakan antara transaksi perdagangan dengan sistem elektronik / *online* dan transaksi

perdagangan dan/atau jasa lainnya termasuk yang masih menggunakan sistem konvensional.

Belum semua potensi pajak yang ada dapat digali. (Arisandy, 2017) menyatakan bahwa, banyak wajib pajak yang masih rendah tingkat kesadaran akan pentingnya pemenuhan kewajiban membayar pajak baik bagi mereka pribadi maupun bagi negara. Perlu diketahui bahwa pemerintah Indonesia dalam menjalankan sistem perpajakannya menganut sistem *self assesement*. Definisi *self assesement* menurut (Wahyuni, 2017) adalah wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar / menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak dituntut untuk patuh dan benar-benar paham mengenai undang-undang yang mengatur tentang perpajakan tersebut guna mewujudkan berjalannya sistem *self assesement* dengan baik. Jika dilihat dari sudut pandang lain mengenai sistem *self assesement*, kecurangan dalam dunia perpajakan seperti *tax evasion* akan sangat mungkin terjadi dan dilakukan oleh wajib pajak sebagai dampak negatif yang ditimbulkan dari sistem *self assesement* itu sendiri (Valentino dan Wairocana, 2019) yang didasari oleh beberapa alasan seperti kurangnya sosialisasi pemerintah hingga keengganan wajib pajak yang lebih merasa tidak memperoleh kompensasi apapun dari pemerintah seperti pengadaan fasilitas umum dan pembangunan infrastruktur yang kurang berjalan.

Masalah lain yang juga harus dituntaskan dari sektor pajak ini adalah kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. (Fuadi dan Mangoting, 2016) beranggapan jika wajib pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang

pada akhirnya akan merugikan negara dengan berkurangnya penerimaan pajak. Menurut (Putri dan Setiawan, 2017) kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi suatu kewajiban perpajakannya serta melaksanakan hak perpajakan yang sudah semestinya dilakukan (Ihsan, 2017). Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah menjadi kendala bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara terutama dari sektor pajak ini (Oktaviani dan Adellina, 2016) salah satu bentuk dari rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak adalah masih adanya wajib pajak membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya mereka bayarkan dan masih banyak para wajib pajak yang tidak melaporkan kewajiban perpajakannya yang harus mereka bayarkan (Pujiwidodo, 2016) Kepatuhan menjadi sangat penting untuk memungut pajak dari wajib pajak, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan seorang wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak akan peraturan-peraturan perpajakan adalah salah satu dari banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak terhutang nya.

Kewajiban perpajakan dapat diimplementasikan dengan baik oleh wajib pajak apabila wajib pajak tersebut mutlak mempunyai pengetahuan atas ketentuan perpajakan dan mau memahaminya secara lebih rinci (Etikasari, 2015) Pemerintah sendiri telah melakukan upaya untuk menambah pengetahuan bagi para wajib pajak, salah satunya adalah melalui penyuluhan, dengan harapan akan semakin banyak wajib pajak yang mempunyai pengetahuan tentang tata cara dan peraturan perpajakan guna menarik masyarakat untuk membayar pajak dan meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak itu sendiri (Ghoni, 2016). Bicara soal

pengetahuan wajib pajak, tingkat pengetahuan yang kurang dari wajib pajak terhadap peraturan perpajakan akan menyebabkan adanya potensi tidak terdeteksinya perpajakan oleh pemerintah baik dalam jumlah kecil maupun besar. Perlu diketahui bahwa wajib pajak akan melakukan dan melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak (Ilhamsyah, 2016). Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak. Kepatuhan dari seorang wajib pajak akan meningkat seiring dengan cara yang dilakukan wajib pajak tersebut untuk mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, sebagaimana (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011) menjelaskan untuk meningkatkan penerimaan pajak, pengetahuan yang cukup dari seorang wajib pajak akan sangat berguna dalam merealisasikan hal tersebut. (Razman, 2005) menyatakan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku akan rendah apabila pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakannya juga rendah.

(Arisandy, 2017) menyatakan bahwa undang-undang telah mengatur terkait ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan. (Muliari dan Setiawan, 2009) menyatakan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak maka disusunlah undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dimana di dalam peraturan perpajakan tersebut juga tercantum terkait sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Nugroho (2006) dalam Muliari dan Setiawan (2009:4) berpendapat bahwa wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila wajib pajak tersebut telah merasa dan sadar bahwa pelaksanaan sanksi

perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan adalah salah satu dari banyaknya akibat apabila sanksi perpajakan masih kurang tegas dan setengah-setengah dalam pelaksanaannya oleh pemerintah.

Timbul sebuah pernyataan bahwa jika pengetahuan wajib pajak sudah dipahami dengan baik, lalu sanksi pajak juga sudah diterapkan tegas oleh pemerintah, semua tidak akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak apabila di dalam dirinya belum ada kesadaran untuk membayar dan patuh terhadap pajak. Kesadaran masyarakat mengenai kewajiban membayar pajak yang rendah seringkali akan berakibat pada semakin banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah oleh pemerintah (Marcori, 2018). Kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat, hingga saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa penarikan pajak oleh pemerintah membebani masyarakat dan kekhawatiran akan penyalahgunaan uang pajak seringkali menjadi pemikiran masyarakat (Nugroho, 2006). Wajib pajak yang memiliki kesadaran rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajibannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Adanya sikap yang negatif dari wajib pajak dengan tidak memenuhi kewajiban membayar pajak hingga diperlukan kesadaran yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri akan arti dan manfaat dari pemungutan pajak tersebut, masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bukan lah untuk pihak lain tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis berkeinginan untuk meneliti nya lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul:

“PENGARUH PENGETAHUAN, SANKSI PAJAK DAN KESADARAN WAJIB
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG
MELAKUKAN KEGIATAN PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DI
SURABAYA”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah pengetahuan dari seorang wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah kesadaran dari seorang wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris apakah pengetahuan tentang perpajakan seorang wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Untuk menganalisis dan membuktikan apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Untuk menganalisis dan membuktikan apakah kesadaran dari seorang wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dan dapat menjadi media pembelajaran secara lebih lanjut. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sebuah nilai tambah khasanah pengetahuan pada sektor pajak di Indonesia.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah diharapkan setelah mengetahui faktor-faktor dan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, tingkat pengetahuan dan kesadaran wajib pajak dapat meningkat lebih dari sebelumnya serta diharapkan wajib pajak timbul rasa untuk semakin patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku

b. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini bagi saya sebagai peneliti adalah dapat memberikan pengalaman saya dalam mengkaji hal secara lebih dalam, dalam hal ini adakah pengaruh dari pengetahuan, sanksi dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta berharap setelah selesainya penelitian ini pengetahuan peneliti mengenai pajak, kesadaran peneliti terhadap pentingnya pajak serta kepatuhan peneliti sebagai wajib pajak dapat meningkat dan semakin patuh sebagai seorang wajib pajak.

c. Bagi Peneliti Lain

Manfaat penelitian ini bagi peneliti lain adalah dapat dijadikan rujukan atau referensi, sumber informasi pada penelitian selanjutnya. Agar dapat lebih dikembangkan bahkan dengan variasi yang lain maupun untuk memperkuat atau untuk membantah hasil penelitian dalam penelitian ini. Selain itu peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan motivasi oleh peneliti lain.